

**ANALISIS PERKEMBANGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
DALAM Mendukung PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI
KABUPATEN PURBALINGGA**

ABSTRAK

Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif, efisien dan mampu mendorong peran masyarakat untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan dalam kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan dalam bidang keuangan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat perkembangan kemampuan keuangan di Kabupaten Purbalingga dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Purbalingga. Untuk data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data keuangan APBD di Kabupaten Purbalingga tahun anggaran 2008-2012, adapun teknik pengumpulan data adalah dengan dokumentasi dan wawancara yang dilakukan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purbalingga. Metode Penelitian ini adalah Deskriptif Komparatif, dengan menggunakan beberapa rasio keuangan yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio indeks kemampuan rutin, rasio keserasian, rasio pertumbuhan, rasio ekonomi, rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut : berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah berada pada kisaran 9,80 % - 12,82% masih berada diantara 0% - 25 % tergolong mempunyai pola hubungan instruktif yang berarti kemampuan pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat masih

relatif rendah meskipun dari tahun ke tahun terus meningkat. Dalam rasio derajat desentralisasi fiskal berada pada kisaran 8,60% - 10,95%, hal ini berarti bahwa tingkat kemandirian/kemampuan keuangan Kabupaten Purbalingga masih rendah dalam melaksanakan otonominya. Untuk rasio indeks kemampuan rutin berada pada kisaran 9,97% - 11,97%, ini artinya PAD memiliki kemampuan yang kurang untuk membiayai pengeluaran rutinya. Pada rasio keserasian pengeluaran belanja rutin berkisar antara 72,77% - 90,20%, sedangkan belanja pembangunan berkisar antara 7,15% - 24,70%, ini berarti pengeluaran rutin lebih besar daripada pengeluaran belanja pembangunan. Rasio pertumbuhan secara keseluruhan mengalami peningkatan di setiap tahunnya yang disebabkan bertambahnya pajak dan retribusi daerah. Dalam rasio ekonomi berada pada kisaran 104,44% - 110,72%, ini artinya kemampuan ekonomi pemerintah Kabupaten Purbalingga kurang ekonomis. Untuk rasio efektivitas berkisar antara 82,71% - 100%, ini berarti kemampuan efektivitas pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga sangat efektif dan pada rasio efisiensi berada pada kisaran 2,21% - 4,21%, ini menunjukkan bahwa kemampuan efisiensi pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga sangat efisien.

Kata kunci : Pemerintah daerah, Otonomi Daerah, Keuangan Daerah.